



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR 07/PENG/PIM/RH.04.02/11/2021

TENTANG

PENERIMAAN USULAN CALON HAKIM *AD HOC* TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021/2022

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 75/WKMA-NY/SB/11/2021 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial kembali mengundang Mahkamah Agung, Pemerintah, dan Masyarakat untuk mengusulkan warga negara terbaik untuk menjadi **Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI** yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
5. Berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
6. Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
8. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
9. Melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
10. Bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan
11. Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim *Ad Hoc* tindak pidana korupsi.

Pendaftaran Calon Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung RI dilakukan secara online (daring), melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id mulai tanggal 22 November s.d. 10 Desember 2021. Berkas persyaratan yang harus disiapkan calon sebagai berikut:

1. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi dibuat di atas kertas bermeterai;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
3. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. Fotokopi ijazah beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dibuat di atas kertas bermeterai dengan melampirkan salinan surat keputusan pengangkatan/kontrak/perjanjian kerja/sertifikat/bukti terkait;
6. Surat keterangan dari pengadilan negeri setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi calon;
8. Surat pernyataan tidak akan merangkap jabatan dan menjadi pimpinan/pengurus serta anggota partai politik atau organisasi massa yang memiliki afiliasi dengan partai politik dibuat di atas kertas bermeterai;

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450

Telp. : (021) 3905876/77, Fax. (021) 3906215

website: www.komisiyudisial.go.id, email: kyri@komisiyudisial.go.id

9. Lembar Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan hakim *Ad Hoc* tindak pidana korupsi;
12. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim *Ad Hoc* tindak pidana korupsi dibuat di atas kertas bermeterai;
13. Pasphoto terbaru (dengan latar belakang warna merah) berukuran maksimal 100 kb diunggah di laman pendaftaran rekrutmen.komisiyudisial.go.id;

Formulir-formulir surat pernyataan dan daftar riwayat hidup dapat diunduh di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Berkas terkait persyaratan dipindai ke dalam format PDF dan diunggah pada situs rekrutmen.komisiyudisial.go.id pada saat melakukan pendaftaran *online* (daring). Berkas pendaftaran fisik akan dimintakan oleh Komisi Yudisial pada saat pemberkasan yang akan ditentukan kemudian.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. Panitia Seleksi **tidak menerima pendaftaran secara langsung** di Kantor Komisi Yudisial. Pertanyaan terkait pendaftaran *online* (daring) dan proses seleksi dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik rekrutmen@komisiyudisial.go.id atau fasilitas *chat online* (daring) di laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id;
2. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
3. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
4. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 November 2021
Wakil Ketua Komisi Yudisial RI,

Drs. M. Taufiq HZ, M.HI.



Lampiran Pengumuman
Nomor : 07/PENG/PIM/RH.04.02/11/2021
Tanggal: 22 November 2021

JADWAL SELEKSI CALON HAKIM *AD HOC* TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH
AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021/2022

| No | Kegiatan | Waktu |
|-----------|--|--------------------------------|
| 1. | Pengumuman dan Pendaftaran | 22 November – 10 Desember 2021 |
| 2. | Seleksi Administrasi | 13 – 23 Desember 2021 |
| 3. | Pengumuman dan Pressconference Kelulusan Administrasi | 29 Desember 2021 |
| 4. | Seleksi Kualitas | 11 – 12 Januari 2022 |
| 5. | Pengumuman dan Pressconference Kelulusan Seleksi Kualitas | 31 Januari 2022 |
| 6. | Asesmen Kepribadian dan Kompetensi; Pemeriksaan Kesehatan dan Kejiwaan | 1 – 11 Maret 2022 |
| 7. | Pengumuman dan Pressconference Kelulusan Seleksi Kesehatan dan Kepribadian | 20 April 2022 |
| 8. | Wawancara | 25 – 29 April 2022 |
| 9. | Penyampaian usulan ke DPR | 14 Mei 2022 |

Keterangan:

1. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan jadwal akan disampaikan melalui situs Komisi Yudisial;
2. Pelaksanaan rangkaian seleksi dapat dilakukan secara daring atau secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, serta menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19.